



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 20 MARET 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tunggu Audit Kerugian Negara

Proyek Jalan Kepahiang

BENGKULU - Sejak kasus proyek jalan batas Kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang naik ke penyidikan, hingga saat ini penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu belum menetapkan tersangka. Alasan penyidik masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP.

Namun demikian, Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes. Pol. Ahmad Tarmizi melalui Kasubdit Tipidkor AKBP. Andi Arisandi, S.Ik menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. "Sekarang masih dalam proses penghitungan atau audit kerugian negara. Setelah itu baru kita gelar. Nanti pasti saya akan beritahukan kepada rekan-rekan media,

sabar dulu ya," ujar Andi.

Sembari menunggu hasil audit kerugian negara, penyidik masih akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi guna memperkuat alat bukti. Sejauh ini sudah lebih dari 15 saksi yang diperiksa. "Tapi saya tidak ingat jumlah pastinya," kata Andi.

Ditanya pihak-pihak mana saja yang calon tersangka, Andi belum mau membeberkan. Ia juga belum mau memberitahu gambaran jumlah tersangka apakah tunggal atau lebih dari 1 orang. "Nanti akan diumumkan. Pada saatnya nanti pasti akan kami informasikan," tutup Andi.

Sebelumnya penyidik sudah mengamankan sejumlah alat bukti berupa dokumen-dokumen terkait dari hasil kegiatan pengeledahan di kantor Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu bidang Bina Marga (BM). Penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan tersangka.

Diusutnya kasus ini sejak penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pekerjaan berupa preservasi rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang.

Proyek sebesar Rp 31,6 miliar di satker di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu itu diduga telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang terdapat dalam surat perjanjian kerja (kontrak) sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tak kecil. (tew)